

SUMBER DANA PERANG REVOLUSI INDONESIA 1945-1949: PEPERANGAN DI JAWA DAN SUMATERA

Rizki Aldi Cahyono

rizkicahyono792@students.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang

Abstrak: Awal kemerdekaan Indonesia diwarnai dengan pemblokiran ekonomi oleh Belanda dan berbagai serangan Belanda untuk menguasai kembali Indonesia, hingga melahirkan suatu periode perang revolusi kemerdekaan 1945-1949. Kesulitan ekonomi membuat Indonesia terkendala dalam mendapatkan sumber dana yang digunakan guna perang mempertahankan kemerdekaan. Artikel ini bertujuan untuk membahas mengenai darimana pejuang revolusi kemerdekaan mendapatkan dana untuk berperang menghadapi Belanda. Terutama wilayah Jawa dan Sumatera yang memiliki berbagai gelaran perang revolusi lantaran keduanya adalah wilayah awal yang diakui Belanda dalam Perjanjian Linggarjati. Penelitian ini menggunakan metode sejarah: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa para pejuang yang tergabung dalam laskar perjuangan melakukan berbagai cara guna mendapatkan dukungan dana perang, mulai dari pertunjukkan amal yang mempertontonkan seni, pencegahan dan perampasan amunisi tentara Belanda, hingga penjualan candu dan penyeludupan barang ekspor ke Singapura. Dapur umum sebagai sumber utama asupan tenaga pejuang juga memiliki dampak signifikan dalam mendukung jalannya perang revolusi kemerdekaan.

Kata kunci: Dana Perang, Revolusi, Kemerdekaan

Abstract: *The beginning of Indonesian independence was marked by an economic blockade by the Dutch and various Dutch attacks to regain control of Indonesia, leading to a period of revolutionary war for independence 1945-1949. Economic difficulties have hampered Indonesia in obtaining sources of funds used for the war to maintain independence. The formulation of the problem studied in this study is to discuss where did the independence revolutionaries get the funds to fight against the Dutch. Especially the regions of Java and Sumatra which had various revolutionary war titles because both were the initial areas recognized by the Dutch in the Linggadjati Agreement. This research uses historical methods: heuristics, criticism, interpretation, and historiography with data collection techniques in the form of library research. The results of the study stated that the fighters who were members of the paramilitary struggle carried out various ways to get support for war funds, such as holding charity shows showing art, intercepting and confiscating ammunition from the Dutch army, to selling opium and smuggling goods exported to Singapore. Public kitchens as the main source of intake for combatants also had a significant impact in supporting the revolutionary war for independence.*

Keywords : *Funds For War, Revolution, Independence*

PENDAHULUAN

Proklamasi kemerdekaan Indonesia bukanlah merupakan titik akhir bagi perjuangan bangsa melawan kolonialisme-imperialisme bangsa asing. Nyatanya Indonesia masih harus menghadapi cengkraman Belanda yang menginginkan kembali bangsa ini, sebagai sebuah dampak dari kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, dimana Jepang hendaknya menyerahkan

kekuasaan atas Indonesia kepada Belanda, tetapi Indonesia justru memproklamasikan diri. Dalam tahun yang sama dengan kemerdekaan (1945) Bangsa Indonesia memasuki periode Revolusi Kemerdekaan, yakni upaya bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan baik melalui menempuh jalur diplomasi maupun melalui pertempuran fisik terbuka. Lantaran secara ekonomis, Indonesia bukanlah menjadi jajahan Belanda, posisinya sejajar dengan Belanda sebagai sebuah bangsa merdeka. Sementara kembalinya Belanda ke Indonesia sebagai neokolonialisme belum memiliki hukum internasional yang kuat (Aman, 2015: 21-22).

Baik diplomasi (perundingan) maupun pertempuran terbuka secara fisik tetap saja membutuhkan dukungan penuh berupa uang, dana transportasi, maupun amunisi perlengkapan perang: senjata, obat-obatan, makanan, hingga tenaga kesehatan yang akan mengobati luka akibat perang. Kebutuhan yang kompleks ini berbanding terbalik dengan keadaan ekonomi Indonesia yang tengah mengalami kemunduran akibat gagalnya nasionalisasi perusahaan Belanda dan pemblokiran Belanda atas pintu keluar-masuk perdagangan RI guna mencekik keadaan republik (Poesponegoro dan Nugroho, 2010: 272-274). Ekonomi bangsa belum terbilang mapan untuk mendanai keseluruhan peperangan yang terjadi antara 1945-1949. Di sisi lain dana yang dibutuhkan dalam peperangan tidaklah sedikit. Sebut saja Perang Jawa pada 1825-1830, dimana perang ini telah menguras kas negeri Belanda dan tewasnya 8 ribu pasukan Belanda (Ricklefs, 2008: 256-258).

Euforia revolusi melanda negeri Indonesia, khususnya kaum muda yang merespon kegairahan dan tantangan kemerdekaan. Laskar-laskar perjuangan yang dibentuk tidak hanya memainkan peranan dalam bertempur melawan Belanda, tetapi juga aktif dalam mencari sumber dana guna kebutuhan akan perang revolusi. Para gerilyawan yang memiliki keahlian lain di bidang kesenian—*ludruk* misalnya—juga berperan sebagai pemain dalam pertunjukan sandiwara. Seperti pada “Krido Budoyo” yang ikut bergerilya melawan Belanda di Malang. Tujuannya adalah menghibur rakyat sekaligus mendapatkan dana untuk kebutuhan perang, seperti SAGRI (Sandiwara Angkatan Gerilya Republik Indonesia) di Wajak daerah Malang bagian selatan (Sapto, 2018: 134). Juga pertunjukan amal yang digelar oleh Laskar Rakyat Djogonegaran, dimana hasil dana digunakan untuk kebutuhan perjuangan kemerdekaan, khususnya PMI dan Laskar Djogonegaran itu sendiri (Arvianita dan Basuki, 2022: 34-35).

Selain dari pertunjukan seni, berbagai penyelundupan perdangan juga dilakukan pada masa perang revolusi kemerdekaan. Singapura menjadi negara tujuan penyelundupan perdangan tersebut, dimana juga melibatkan semua kalangan, mulai dari pribumi pemerintah dibawah naungan *Indoff (Indonesian Office)* hingga etnis Tionghoa dan Melayu yang mendukung revolusi (Alfatiana dan Wulandari, 2022: 44-46). Bahkan euforia revolusi kemerdekaan juga diwarnai perdagangan candu yang dimotori oleh para gerilyawan di bawah naungan pemerintah hingga membentuk agen-agen kantor lokal, seperti Kantor Regi dan Candu Surakarta pimpinan Soewahjo, Kantor Candu dan Garam Yogyakarta, Kantor Candu dan Obat Kediri, dan sebagainya. Lantaran hanya candu yang mampu menghasilkan uang di tengah ekonomi bangsa yang porak-poranda (Ibrahim, 2016: 79).

Setidaknya periode revolusi kemerdekaan 1945 hingga 1949 telah menggerakkan semua kalangan masyarakat demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia sesuai perannya di dalam struktur sosial masing-masing. Mulai dari seniman, para perempuan yang bergerak di dapur-dapur umum, hingga para bandit dan pelacur yang memiliki kontribusi

besar dalam dukungan perjuangan yang sesuai dengan “kemampuannya”. Penelitian ini berfokus membahas sumber dana untuk perang revolusi Indonesia selama kurun waktu 1945 hingga 1949 itu didapatkan, terutama peperangan Jawa dan Sumatera. Lantaran Jawa-Sumatera adalah wilayah awal bangsa Indonesia yang diakui Belanda melalui Perjanjian Linggarjati, juga banyak digelar perang di kedua wilayah ini.

Sebagai gambaran awal, penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana kondisi awal Indonesia pasca-kemerdekaan terlebih dari hal ekonomi hingga bagaimana tanggapan penduduk Indonesia dalam menghadapi euforia revolusi kemerdekaan. Selanjutnya mengarah pada pembahasan utama yakni melalui apa dan bagaimana dana peperangan di Jawa dan Sumatera itu didapatkan. Tidak kalah penting, penelitian ini juga akan membahas mengenai peranan para tokoh ‘ekonomi bawah’ seperti petani, seniman, dan pelacur yang ternyata memberikan sumbangsih terhadap keperluan perang revolusi kemerdekaan, terlepas dari ketiganya yang dipandang sebagai masyarakat ekonomi kelas bawah. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah mengungkapkan sumber pemenuhan kebutuhan peperangan Indonesia selama masa revolusi mempertahankan kemerdekaan Indonesia terutama pada perang Jawa dan Sumatera.

METODE PENELITIAN

Dalam mengungkap tema penelitian mengenai dana perang revolusi kemerdekaan Indonesia di Jawa dan Sumatera, digunakan metode penelitian sejarah. Dimana metode ini dilakukan melalui lima tahapan: pemilihan topik, heuristik, kritik atau verifikasi, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2018: 69). Heuristik atau tahap pengumpulan sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi literatur. Dimana data-data yang diperoleh berupa data sekunder, yakni buku-buku referensi dan artikel ilmiah sebagai landasan berpikir. Tahap selanjutnya, data yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan dilakukan kritik atau verifikasi, yang mana tahap ini ditujukan untuk mengetahui kredibilitas dan keorisinilan sumber. Setelah tahap kritik, data kemudian diinterpretasikan atau ditafsirkan sebagai bahan kepenulisan sejarah atau historiografi pada langkah selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemaknaan Perang Revolusi Kemerdekaan

Bagi Belanda periode revolusi Indonesia adalah upaya mereka menguasai kembali Indonesia untuk yang ketiga kalinya. *Pertama* pada abad 17 dan 18 M, dimana mereka mundur lantaran ketidakcakapan mereka sekaligus kewalahan menghadapi perlawanan rakyat Indonesia. Upaya *kedua*, adalah saat abad ke 19 dan 20 M, yang berujung pada kekalahan Belanda oleh pihak Jepang. Sementara yang *ketiga* ini adalah makin berat konteksnya. Lantaran mereka harus menghadapi bangsa Indonesia secara keseluruhan, sebuah bangsa muda yang baru saja merdeka dimana rasa dan upaya ‘memiliki kemerdekaan’ itu sangat tinggi (Ricklefs, 2008: 447-448).

Revolusi yang menjadi alat tercapainya kemerdekaan bukan hanya merupakan kisah sentral dalam sejarah Indonesia, melainkan juga merupakan unsur yang kuat sebagai pandangan Bangsa Indonesia akan bangsanya sendiri. Dari revolusi kemerdekaan ditarik

penggolongan masyarakat Indonesia, yang dibedakan antara mereka yang pro dan kontra revolusi, baik perjuangan melalui peperangan maupun diplomasi. Kisruh revolusi diperparah dengan hadirnya revolusi sosial yang berjalan seiringan dengan peperangan fisik dan upaya diplomasi antara kekuatan-kekuatan Islam, sekuler, dan sebagainya. Mereka tumbuh pada sebuah bangsa yang sama, namun syarat akan kecurigaan satu sama lain. Meskipun saling timbul kecurigaan, nyatanya semua bertekad untuk satu tujuan yakni Indonesia merdeka seutuhnya (Ricklefs, 2008: 446-447). Gelora semangat perjuangan juga terlihat di dalam dua sosok raja yakni Sultan Hamengkubuwana IX dan Paku Alam VII yang diikuti oleh segenap lapisan masyarakat Yogyakarta sehingga dimanfaatkan meyakinkan proklamator menerima Yogyakarta sebagai ibu kota (Arvianita dan Basuki, 2022: 26).

Upaya pendudukan kembali Indonesia hampir berhasil, lantaran bangsa Indonesia masih berkutik pada permasalahan komunikasi yang buruk, banyaknya konflik internal, perbedaan pandangan akan mengusir tentara Belanda, hingga lemahnya pemimpin dan kepemimpinan di pusat. Lagaknya revolusi kemerdekaan merupakan sebuah kejadian yang masih terpotong-potong atas beragam dukungan akan proklamasi. Keempat raja Jawa pada waktu itu mungkin dengan leluasa mendukung proklamasi, tetapi tidak bagi mereka para kerajaan kecil di pedalaman. Bagi mereka upaya proklamasi hanya menyenangkan pihak pusat. Sehingga dengan mudah dapat diasut dan dimanfaatkan Belanda dalam menghimpun dukungan melawan republik (MC Ricklefs, 2008: 450-451). Kekecewaan terhadap proklamasi juga dirasakan oleh para eks pekerja perusahaan Belanda yang "ditendang" dari tempat kerja maupun akibat gulung tikarnya perusahaan Belanda setelah nasionalisasi, diperburuk dengan blockade ekonomi yang menghentikan produksi perusahaan, seperti pabrik garam di Madura yang memaksa penduduk keluar menyebrang selat secara diam-diam guna mendapatkan bahan makanan (Cahyaningsih, 2018: 324).

Tantangan kemerdekaan direspon dengan kegembiraan dan penuh kegairahan, khususnya oleh kaum muda. Kekalahan Jepang pada perang dunia II telah menciutkan nyali tentara Jepang untuk meninggalkan pelosok pedalaman dan pulang ke negaranya atau mereka harus menghadapi bengisnya laskar perjuangan yang terobsesi kemerdekaan. Seperti aksi Mubachi di Bandung dan pembunuhan serdadu Jepang oleh pemuda Semarang di bawah pimpinan S Karno dan Ibnu Pama (Aman, 2015: 18). Pelucutan senjata tentara Jepang oleh pemuda dilakukan. Tidak hanya senjata, tetapi juga pengambil alihan sarana milik Jepang oleh para pemuda, seperti stasiun, pemancar radio, hingga sistem trem listrik. Akhir Bulan September, pemuda berhasil menguasai instalasi Jepang khususnya di wilayah Bandung, Malang, Yogyakarta, dan Surakarta. (Ricklefs, 2008: 451). Namun pelucutan senjata tersebut di beberapa Yogyakarta tidak dibarengi dengan pengetahuan penggunaan (Arvianita dan Basuki, 2022: 29). Perebutan media komunikasi masa menjadi frontal, manakala digunakan sebagai penghubung dengan dunia luar di tengah blockade dan perang melawan Belanda (Poesponegoro dan Nugroho, 2010: 298).

Banyak cara yang ditempuh para anak bangsa dalam merespon revolusi kemerdekaan. Di Sumatera, pembentukan barisan-barisan perjuangan yang berisikan mantan prajurit PETA dan Heiho dilakukan. Mereka terkumpul pada sebuah barisan panji

perjuangan. Sementara laskar-laskar islam, seperti Hizbullah, dan Masyumi memilih membentuk laskar sendiri dengan islam sebagai cara pandangnya, barisan ini dikenal dengan Barisan Sabilillah (Pasukan di Jalan Tuhan) di Jawa Barat dan sekitarnya (Ricklefs, 2008: 452-453). Sistem pertahanan dan keamanan negara juga dibentuk sebagai mandat atas suasana yang benar-benar genting. Barisan Keamanan Rakyat (BKR) yang merupakan gabungan eks-PETA dan eks-KNIL dibentuk sesaat sidang PPKI III di Jakarta (Maeswara, 2010: 14). Oleh karena kebutuhan structural organisasi, diamanahkan Urip Sumoharjo untuk mendesain organisasi kemiliteran yang siap mempertahankan keamanan dan keutuhan bangsa. Dan meleburlah BKR pada TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Kelanjutannya adalah konflik internal organisasi lantaran tidak adanya sosok panglima, yang nantinya menjadikan Sudirman seorang mantan PETA menjadi panglima besar dan melakukan perang gerilya. Situasi genting dan gawat pasca kemerdekaan direspon bangsa Indonesia dengan berbagai pendirian badan perjuangan dan laskar-laskar bentukkan rakyat sendiri dalam upaya dukungan mempertahankan kemerdekaan Indonesia (Atno dan Pratama, 2018: 12-17).

Merespons revolusi kemerdekaan tidak hanya dilakukan dengan memanggul senjata sebagai tanda kemenangan atau berunding panas di meja diplomasi antar negara. Euforia dan semangat revolusi juga ada dalam tubuh jiwa sastra dan seni. Melalui surat-surat kabar dan majalah mereka menyuarakan 'kepedulian'-nya akan membela kemerdekaan bangsa dari Jakarta, Surakarta, dan Yogyakarta. Angkatan '45, begitu mereka menyebut dirinya, yang berisikan para sastrawan dan seniman kemerdekaan: Chairin Anwar, Pramoedya Ananta Toer, Mochtar Lubis, dan sebagainya. Termasuk juga sastrawan bergariskan islam sebagai cara pandangnya, yakni Bahrum Rangkuti yang terobsesi pemikiran Muhammad Iqbal dari Pakistan. Poster-poster dukungan anti-Belanda juga tersebar sebagai bentuk pengungkapan seniman mendukung revolusi kemerdekaan, salah satunya yakni karya Affandi dan Sudjojono. Bahkan melalui karya-karya mereka pula sebuah peperangan dapat dilaksanakan (Ricklefs, 2008: 452).

Singkatnya Bulan November-Desember 1945, semangat revolusi kemerdekaan telah merebak ke seluruh penjuru Indonesia. Revolusi kemerdekaan telah sampai pada tatanan masyarakat paling bawah, yakni pedesaan yang identic disebutnya 'revolusi sosial' sebuah pertentangan antar elite-elite penguasa yang berlaku dan pertentangan struktur-struktur dalam kelas sosial.

Indonesia tidak hanya dihadapkan pada permasalahan keamanan pertahanan wilayah melainkan juga dihadapkan pada permasalahan ekonomi yang terus mendapat tekanan dari Belanda. Di Sumatera kapal-kapal yang hendak membawa bantuan dari luar untuk Indonesia dilarang memasuki kawasan Indonesia oleh Belanda. Belanda telah memblokir jaringan ekonomi dan hubungan Indonesia dengan luar. Kebijakan ekonomi perang pun dikeluarkan, yang menyatakan bahwa segala sumber pendapatan perekonomian digunakan untuk membiayai perang kemerdekaan. Sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan ekonomi, kas negara kosong sementara kebutuhan pembiayaan perang revolusi membengkak (Alfatiana dan Wulandari, 2022: 44).

Pemerintah juga mengintruksikan melakukan penghematan pada pengeluaran guna membiayai besaran biaya perang kemerdekaan. Salah satunya pemerintahan Sultan Hamengkubuwono IX, beliau memerintahkan untuk menekan biaya pengeluaran pemerintahan dan mencari sebanyak-banyaknya dana guna membantu peperangan yang terjadi. Adapun usaha-usaha yang dilakukan HB IX antara lain dengan melakukan penghematan energi pada Jawatan Listrik dan Gas Yogyakarta. Sementara dalam upaya mendapatkan penghasilan, beliau mengeluarkan izin pembuatan garam dan HB IX juga mengadakan pembagian kupon bagi masyarakat Yogyakarta yang membutuhkan. Kupon tersebut dapat ditukarkan dengan sembako berupa beras dan sebagainya. (Arvianita dan Basuki, 2022: 27-29).

Sumber Dana Peperangan di Jawa

Peranan perjuangan revolusi kemerdekaan tidaklah lepas dari kelahiran badan-badan perjuangan revolusi kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya bermentalkan nyali saja, badan perjuangan kemerdekaan Indonesia juga harus pandai mencari dana guna membantu dalam perang revolusi Indonesia. Dalam hal ini kolaborasi antara badan perjuangan dengan media pers sangat dibutuhkan. Lantaran media pers dapat dijadikan media pengiklanan penggalangan dana. Dari pers-lah dunia luar maupun masyarakat internal mengetahui kebutuhan dana dalam perang revolusi kemerdekaan Indonesia.

Kedaulatan Rakyat adalah salah satu media pers yang rajin menginformasikan kebutuhan dana perang revolusi. Media yang berkantor pudat di Jl. Mangkubumi Yogyakarta 22 ini tidak hanya menerbitkan penggalangan dana saja, tetapi juga menyampaikan dana masuk dari para donator kemerdekaan. Dana yang terkumpul tersebut nantinya akan disalurkan untuk membiayai kebutuhan perang, dalam hal ini melalui lembaga, seperti palang merah dan badan-badan perjuangan lainnya. Dalam salah satu surat kabarnya disebutkan bahwa hingga Agustus 1946, dibutuhkan anggaran dana sekitar f 14.432.123 yang mana dana perjuangan kemerdekaan adalah f 6.551.571, paling besar jika dibandingkan dana untuk pemerintahan, KNIP, PMI, kegiatan sosial, dan pendidikan. (Arvianita dan Basuki, 2022. 34-35).

Badan perjuangan dan rakyat juga bergerak mencari dana perang dengan cara melakukan pertunjukan kesenian. Selain menghibur penonton dan mengobati luka psikologis akibat perang, pertunjukan ini juga dilakukan atas tujuan pemenuhan materi peperangan juga di dalamnya disusupi semangat nasionalisme (Adeng, 2012: 47). Salah satu yang menggelar pertunjukan dana ini adalah Rukun Kampung Djogonegaran di Yogyakarta pada 14 November 1945. Di dalamnya menyajikan cerita sandiwara berjudul 'Pemberontakan Rakyat' serta pertunjukan sulap. Dana yang terkumpul akan diserahkan setengahnya kepada badan perjuangan atau Fond Kemerdekaan dan separuhnya lagi kepada kebutuhan laskar (Arvianita dan Basuki, 2022: 33-34). Juga dilakukan oleh para gerilyawan Krido Budoyo dan Sekar Mulya di Malang yang menampilkan pertunjukkan *ludruk* sekaligus sebagai sarana dalam menggugah kesadaran rakyat akan makna perjuangan. (Sapto, 2018: 134).

Upaya Laskar Rukun Kampung ternyata telah menggerakkan POSI atau Persatuan Usaha Sandiwara Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan agar badan-badan perjuangan lain melakukan tindakan yang sama yakni melakukan pertunjukan guna perang kemerdekaan. Hingga pada 1946, berbagai macam pertunjukan dilakukan. Bukan hanya sandiwara, tetapi juga sulap, pemutaran film, hingga musik keroncong. Dana yang terkumpul juga dialokasikan untuk PMI, Fond Kemerdekaan serta kelaskaran revolusi. Pertunjukan amal ini mencapai puncak pada 1946 dengan terhitung sebanyak 53 kali dilaksanakan. Namun selang setahun setelahnya mengalami penurunan, alasannya dimungkinkan karena laskar dan badan perjuangan telah mampu berdiri melalui dana hibah dan sebagainya (Arvianita dan Basuki, 2022: 35-37). Sementara di Malang pertunjukan seni-amal dikembangkan dengan membentuk perkumpulan SAGRI (Sandiwara Angkatan Gerilya Republik Indonesia) yang berfokus utama menghibur hati rakyat di tengah perang yang berkecamuk melalui pembaharuan seni pewayangan yakni wayang suluk (Sapto, 2018: 134-135).

Lain halnya yang dilakukan di Surabaya. Sebuah aksi kekerasan dalam mendapatkan dana guna peperangan revolusi kemerdekaan dilakukan. Salah satunya yakni penggrebekan Gedung Bank Escompto milik Belanda yang telah dikuasai Jepang. Semua berawal ketika Dr. Samsi selaku menteri keuangan mendapat laporan bahwa di gedung bank Escompto terdapat uang tinggalan Belanda yang disita Jepang. Dilakukanlah bujukan kepada pihak Jepang, yang didalamnya tersiar strategi pengambilan dengan jalan kekerasan, sebagai sebuah upaya rekayasa. Dari penggrebekan yang dilakukan secara tersistem oleh Samsi, Moestopo (selaku pimpinan BKR), dan RM Mangoendiprojo didapatlah uang sejumlah 100 juta gulden, yang mana dari 100 juta gulden ini kemudian disumbangkan kepada pemerintah RI sebanyak 35 juta gulden (Ardianti, 2022: 90-91).

Upaya pencarian dan melalui kekerasan juga terjadi di kawasan wilayah Jawa Tengah bagian barat, yakni meliputi Karsidenan Banyumas dan sekitarnya. Dimana guna mempertahankan kemerdekaan dari pihak Belanda, para laskar perjuangan rakyat banyak melakukan penghadangan pasukan Belanda di jalan yang biasa dilalui pasukan Belanda. Jalan tersebut sangat sepi sehingga dengan mudah barisan pemuda rakyat menyusun strategi untuk menghentikan dan menembakki secara brutal pasukan Belanda yang tengah beroperasi (arah Ajibarang-Purwokerto). Pasukan Belanda yang tidak siap dengan hujaman peluru tersebut harus kalah dari laskar pemuda rakyat. Setelah mereka kalah, amunisi dan perbekalan pasukan Belanda diambil secara paksa oleh laskar pemuda rakyat dan mereka menghilang, masuk ke dalam semak-semak untuk selanjutnya menuju markas di pedalaman. Jalan inilah yang dikenal sebagai jalan maut atau *doden weg* pada masanya (Tim DHHC BPP, 2003: 21-22).

Sementara di Madura yang tercium oleh Belanda sebagai penghasil garam terbesar yang dapat membahayakan pasukan Belanda, lantaran sumber garam tersebut mampu menyumbangkan dana untuk perang revolusi kemerdekaan. Kekhawatiran Belanda tersebut kemudian diimplementasikan dengan penutupan Pulau Madura dari segala penjuru, mereka (orang Madura) dilarang mengekspor garam alias Belanda telah

memblokade ekonomi Madura. Penduduk Madura tidak tinggal diam, mereka terus menerobos blockade tersebut guna melaporkan keadaan Madura ke Pulau Jawa sekaligus juga mencari persediaan makanan. Hingga pada 5 Oktober 1946, pemerintah Madura mengirimkan delegasinya untuk melaporkan keadaan Madura dan mencari bahan persediaan makanan ke Jawa. Namun Belanda yang mengetahui kehadiran delegasi ini dengan sigap menembakki mereka, sehingga kapal yang digunakan sebagai moda transportasi tenggelam dan hanya menyisakan dua orang selamat. Setelehnya gerakan kondolidasi antara pemerintah Madura dengan Belanda terus dilakukan (Cahyaningsih, 2018: 323-326).

Selama perang revolusi kemerdekaan dan pemberlakuan ekonomi perang menjadikan pemerintah tidak yakin akan keberadaan sector perkebunan dan pertanian sebagai satu-satunya sumber ekonomi. Terlebih ketika Belanda memblokade wilayah perekonomian Indonesia. Masa-masa sulit ekonomi Indonesia diperparah dengan stagnannya ekonomi keuangan bangsa. Dimana pada saat itu telah beredar tiga mata uang sekaligus di masyarakat, yakni mata uang Jepang, mata uang Indonesia atau ORI dan mata uang Belanda melalui NICA. Kesulitan mengendalikan peredaran mata uang ini dirasakan oleh pemerintah, sehingga membuat nilai ORI semakin hancur (Poesponegoro dan Marwati, 2010: 272). Dalam upaya mendapatkan uang atau dana yang cepat dan mudah, tidak mungkin pemerintah memaksakan ekspor hasil perkebunan dan pertanian ke luar negeri, lantaran itu sangat berbahaya sekali, mengingat 'gerbang ekspor Indonesia' tengah dijaga Belanda. Sehingga muncul gagasan pemikiran memperdagangkan candu sebagai cara tercepat dalam memperoleh keuangan dan cara termudah yang menekan angka risiko (Ibrahim, 2016: 79).

Bahkan upaya perdagangan candu tidak hanya dilakukan oleh badan perjuangan—sebagai pengamanan, dagang sendiri, dan oknum individu saja, tetapi perdagangan candu tersebut didukung sepenuhnya oleh kepolisian (Nur L, 2019: 66), pemerintah, guna memperoleh dana dalam perjalanan perjuangan diplomasi Indonesia. Beberapa surat perintah dikeluarkan yang mengisyaratkan bahwa kementerian keuangan dan kementerian pertahanan dan keamanan membantu dalam pengedaran candu ke luar negeri. Mr. A. A. Maramis selaku menteri keuangan pada waktu itu bahkan menyatakan secara terang-terangan kepada kepolisian untuk membantu memperdagangkan candu dan memberikan izin kepada pihak terkait yang membawa candu, dalam proses perjalanan penjualannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa perdagangan candu pada waktu itu menjadi legal, dengan dibuktikan pendirian beberapa Kantor Regi Candu di sejumlah wilayah untuk memantau dan menampung sementara sebelum dikirim ke wilayah lain (Ibrahim, 2016: 87-89).

Amunisi persenjataan juga merupakan perbekalan penting dalam upaya mempertahankan diri dalam serangan musuh—dalam hal ini Belanda dan Jepang. Pada umumnya senjata yang didapat dan digunakan untuk perlawanan oleh rakyat dan laskar perjuangan daerah adalah menggunakan senjata rampasan Jepang. Tokoh yang terkenal dalam hal perampasan senjata adalah Bung Tomo dan RM Mangoendiprojo. Mereka menginisiasi pengepungan Gudang senjata Don Boscho di Surabaya pada 30 Agustus 1945.

Terjadi perundingan alot dengan Mayor Hazimoto ketika Sutomo meminta beberapa pucuk senjata. Namun beberapa saat kemudian terjadi pengebungan besar-besaran yang menyebabkan pihak Jepang menyerah dan terpaksa memberikan senjata kepada pihak pemuda Indonesia. Jumlahnya diperkirakan 27.830 senjata, revolver sebanyak 3.360, serta persediaan amunisi yang banyak. Tidak hanya merebut senjata saja, melainkan dilakukan pula pengambil alihan markas yang telah terjadi pertempuran, yakni Markas Kempetai dengan tulisan 'milik RI'. (Rehardini, 2022: 89-90)

Sumber Dana Peperangan di Sumatera

Pengumpulan dana peperangan baik di Jawa maupun di Sumatera sejatinya memiliki kesamaan, yakni sama-sama menggunakan candu sebagai bahan perdagangan yang efektif dalam menghasilkan uang yang cepat. Namun yang berbeda adalah, jika di Jawa perang revolusi kemerdekaan adalah melawan Belanda, baik secara pertempuran fisik maupun perundingan jalur diplomasi, maka di Sumatera lebih banyak terjadi revolusi sosial dalam tubuh masyarakat Sumatera guna menolak kekuasaan golongan-golongan elit bangsawan. Permusuhan sengit terjadi bukan antar negara, tetapi justru antar kaumnya sendiri (Ricklefs, 2008: 463).

Pihak bangsawan Aceh tidak mau ditinggalkan Belanda dari tanahnya lantaran selama ini kaum bangsawan merasa terlindungi di bawah naungan Belanda. Sementara sebaliknya, pihak ulama menginginkan Belanda segera hengkang dari wilayah Aceh dan secara resmi Aceh merdeka. Dinamika pertempuran semakin panas dengan bergabungnya sertus orang Jepang ke dalam masyarakat Aceh sebagai pelatih sekaligus penyuplai senjata yang berujung pada perang saudara. Pihak bangsawan yang kehilangan dukungan terpaksa mengikuti kehendak ulama yang pro republik. Peperangan saudara di Aceh masa revolusi kemerdekaan menandai mengapa hingga saat ini Aceh 'berjarak' dengan wilayah lain di Indonesia. Selain karena jaraknya, secara historis juga Aceh tidak disentuh oleh Belanda sesaat perang revolusi kemerdekaan. Pihak Belanda justru menganggap Aceh sebagai sebuah wilayah yang stabil dan hanya disibukkan dengan perlawanan atau konflik internal wilayah. (Alfian dkk, 1982: 102-117).

Di Sumatera Timur, terjadi perlawanan antara raja-raja Sumatera yang ditunggangi oleh kaum kiri. Salah satunya yakni pertentangan antara raja Batak Simalungun dengan raja Batak Karo pada tahun 1946 dan menimbulkan pembantaian massal hingga memakan korban jiwa beratus-ratus. Amir Hamzah adalah salah satu penyair yang menjadi korban dalam pembantaian saudara ini. Revolusi sosial juga terjadi di wilayah Tapanuli atau Sumatera Utara, yakni pertentangan antara Suku Toba yang mendominasi agama Kristen dengan Suku Karo yang mendominasi dan mempertahankan agama Islam. Sehingga Belanda dengan mudah memanfaatkan situasi demi keuntungan dirinya (Ricklefs, 2008: 465)

Pemblokiran ekonomi oleh Belanda membuat kawasan Sumatera mengalami kesulitan dalam hal ekspor-impor perdagangan. Pengawasan Sumatera yang lengah banyak

dimanfaatkan oleh pihak penduduk Indonesia untuk melakukan penyelundupan ekspor bumi Sumatera yang diperdagangkan ke wilayah Singapura atau disebutnya sebagai perdagangan gelap. Operasi Meriam Bee adalah operasi yang mengangkut 100ton gula untuk dijual secara rahasia untuk keperluan senjata dan keperluan resimen (Alfatiana dan Wulandari, 2022: 46). Jika ditotal hasil penyelundupan barang-barang ke luar negeri secara diam-diam, yang diterima Singapura adalah kurang lebih \$ 20 juta dari Sumatera dan \$ 1 juta dari Jawa. Sementara jika menghitung jumlah barang yang diterima Sumatera dan Jawa kurang lebih adalah \$ 3juta ke Sumatera dan \$ 2 juta ke Jawa (Poesponegoro dan Nugroho, 2010: 277).

Pemusatan penyelundupan ke wilayah Singapura dan Malaya lantaran jaraknya yang relatif dekat dengan menggunakan perahu layar dan *speedboat* dengan komoditas hasil perkebunan, gula pasir, emas, opium, dan sebagainya (Alfatiana dan Wulandari, 2022: 47). Sejak 1947, pemerintah RI resmi membentuk *Indonesia Office (Indoff)* dengan Mr. Oetojo Ramelan sebagai ketua, yang secara resmi ialah badan perjuangan politik luar negeri juga pengatur usaha penebus blockade Belanda secara rahasia. Adapun hubungan kerja sama pihak luar terus dilakukan oleh pemerintah. Melalui BTC (*Banking and Trading Corporation*) Dr. Sumitro Djodjohadikusumo serta Dr. Ong Eng Die berhasil menjalin kerja sama dengan *Isbrantsen Inc* selaku perusahaan swasta Amerika. Meskipun tatkala pengiriman ekspor dicegat oleh kapal Belanda dan berujung pada penyitaan muatan (Poesponegoro dan Nugroho, 2010: 276).

Ali Djajangprawira merupakan salah satu tokoh KPLUN (Kementerian Pertahanan Urusan Luar Negeri) yang berperan dalam pengadaan senjata sekaligus penyelundupan ekspor ke Singapura. Pembelian senjata dilakukan dengan penjualan ekspor terlebih dahulu, misalnya pada November 1946 Ali ditugaskan membeli senjata militer dengan terlebih dahulu menjual karet secara penyeludupan. Terhitung ribuan ton karet telah ia seludupkan ke Singapura hingga akhir 1948 (Alfatiana dan Wulandari, 2022: 47-48). Berlanjut pada kisah Utoyo Ramelan yang merupakan petinggi *Indoff* yang berhasil meningkatkan intensif hasil penyelundupan selama tiga tahun awal, meskipun banyak tuduhan kepada dirinya (Poesponegoro dan Nugroho, 2010: 277). Ada pula Zairin Zain yang berhasil membuka ruang kerja sama dengan Singapura. Ada pula Suryono Darusman yang berhasil membawa 1.800 pucuk senapan, 6 meriam, alat bedah, dan sebagainya dengan bermodalkan penyelundupan 100ton gula. Juga A. Samad Ismail hingga Djumbang Roesad yang berhasil masuk ke *Trade and Finance Departemen* (Alfatiana dan Wulandari, 2022: 50-53).

Peranan Dapur Umum dalam Revolusi Kemerdekaan

Kebutuhan perlengkapan perang revolusi kemerdekaan tidak hanya masalah amunisi dan sistem persenjataan saja. Lebih dari itu, prajurit Indonesia baik yang berasal dari pasukan tentara negara maupun pasukan laskar dan badan perjuangan rakyat juga membutuhkan asupan tenaga dalam bertempur menghadapi musuh. Dapur umum sebagai

tidak hanya sebagai tempat “mengisi perut”, tetapi juga sebagai ajang pertemuan pejuang dan masyarakat, markas pejuang hingga sebagai rumah sakit darurat. Tempatnya mengambil rumah pamong desa, lantaran ketersediaan bahan makanan yang cukup sekaligus penghormatan terhadap pamong. Dapur umum digerakan atas partisipasi rakyat dalam menyumbangkan tenaga dan pikiran mereka untuk menyediakan makanan bagi para pejuang kemerdekaan. (Hidayat dan Siswanta, 2022: 33-34).

Di Yogyakarta, keberadaan dapur umum banyak dibentuk di setiap kabupaten, yakni empat kabupaten dengan masing-masing satu dapur umum. Merujuk pada definisi indikatif, bahwa berarti menjemput nasi bungkus yang telah siap di rumah penduduk. Sumber dana yang digunakan untuk memasak adalah bersumber dari partisipasi aktif masyarakat dan beberapa dari upaya galang dana yang dilakukan oleh badan-badan perjuangan kemerdekaan juga sumbangan penduduk: beras, lauk, sayur, kayu bakar, hingga uang yang dikelola secara bergiliran semampunya (Winarni dkk, 2013: 73-74).

Dapur umum adalah wujud dari sikap gotong royong masyarakat Indonesia. Para relawan dapur umum diisi oleh mereka yang tidak ikut dalam pertempuran fisik melawan Belanda. Melalui dapur umum peranan kaum wanita dalam menggerakkan dan ikut berjuang bagi kemerdekaan bangsa terlihat, selain juga terlibat dalam kesehatan, pencarian dana melalui pelelangan di pasar, hingga penerangan melalui pendidikan (Fitria dan Djumawan, 201-204)

Hingga tahun 1949, dapur umum menjadi bagian dari Badan Urusan Makanan atau BOM yang diketuai oleh Ibu Ruswo serta Ibu Djojodiguno. Tanggal 6-7 Oktober 1945 setelah terjadi peristiwa Kotabaru, Ibu Ruswo dan teman-teman secara serempak mengirimkan masakan atau makanan dan obat-obatan ke daerah Kotabaru yang kemudian terus berlangsung hingga peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Salah satu yang juga ikut berperan dalam pengabdian di dapur umum adalah Nyi Ahmad Dahlan, istri dari Ahmad Dahlan seorang pahlawan revolusi kemerdekaan (Winarni dkk, 2013: 74-76).

Keberadaan dapur umum tidak dapat dipisahkan dari kelangkaan sumber bahan makanan hingga banyaknya pendatang yang merupakan gerilyawan daerah lain atas tugas membantu suatu daerah (Hidayat dan Siswanta, 2022: 35-36). Pengadaan dapur umum berlangsung berpindah-pindah dan membutuhkan kehati-hatian bagi keluarga yang memberi makan gerilyawan. Beberapa contoh dapur umum yang ada di Yogyakarta (Winarni dkk, 2013: 76-139):

- a) Dapur Umum Sleman Timur: Kelurahan Plataran, Tegaltirto, Manguwoharjo, Madurejo;
- b) Dapur umum di Sleman Tengah meliputi dapur umum di Kelurahan Purwobinangun, Pendowoharjo, Sariharjo, Sendangadi, dan Kelurahan Donoharjo;
- c) Dapur umum di Sleman Barat di Kelurahan Gamping, dan Kelurahan Sendangagung;
- d) Dapur umum di Bantul seperti dapur umum di Kelurahan Segoroyoso, Bangunjiwo, dan Kelurahan Wonokromo;
- e) Dapur umum di Kota Yogyakarta dapur umum di Jalan Ngaben 4, Keprakan Lor;

- f) Dapur umum di Kulonprogo seperti di Kelurahan Sidomulyo, Banjarsari, Kaligintung, Banjarharjo, dan Kelurahan Banjaroyo; dan,
- g) Dapur umum di Gunungkidul, di kelurahan Bejiharjo, Wareng dan Siraman.

Dapur umum sebagai markas pejuang artinya dapur umum sebagai tempat digelarnya rapat strategi pertempuran, seperti dapur umum di Dusun Kemusuk. Dapur umum juga digunakan sebagai rumah sakit darurat yang menghadirkan PMI sebagai penolong, meskipun anggota PMI merangkap masuk sebagai laskar gerilyawan (Hidayat dan Siswanta, 2022: 37-38).

KESIMPULAN

Revolusi kemerdekaan Indonesia 1945-1949 tidak hanya membahas mengenai upaya pertahanan kemerdekaan yang dilakukan melalui dua cara yakni perjuangan secara fisik dan perjuangan secara diplomasi. Keadaan ekonomi Indonesia yang tengah diblokade Belanda membuat perekonomian jatuh, sementara serangan Belanda atas Indonesia terus dilakukan. Hal ini membuat para gerilyawan dan pemerintah turut dalam upaya mencari dana perang revolusi kemerdekaan. Berbagai cara dilakukan guna mendapatkan dana dalam waktu cepat. Pertunjukkan amal yang dilakukan oleh para seniman merangkap gerilyawan dengan bekerja sama dengan surat kabar sebagai media promosinya, seperti Laskar Rukun Kampung Djogonegaran di Yogyakarta dan komunitas *ludruk* di Malang dan Wajak. Upaya lain seperti perdagangan candu gencar dilakukan, bahkan didukung oleh pemerintah dan barisan keamanan untuk memastikan keamanan candu sampai tujuan. Terdapat pula penyelundupan penjualan garam dari Madura ke Jawa, serta penyelundupan ekspor dari Sumatera ke Singapura hingga menghasilkan dana yang cukup untuk pembelian senjata. Bahkan secara sporadis, gerilyawan melakukan penghadangan terhadap patroli tentara Belanda guna melucuti amunisinya. Perang revolusi kemerdekaan juga tidak dapat dilepaskan dari peran dapur umum sebagai sarana pemenuhan logistik, markas sementara, hingga rumah sakit darurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeng. (2012). Peranan Seniman dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia. *Jurnal Patanjala*, Vol. 4 (2), hal. 45-47.
- Alfatiana, Lesta dan Ayu Wulandari. (2022). Di Balik Layar Penyelundupan: Tokoh-Tokoh dalam Prdagangan Gelap Pemerintah Republik Sigapura 1947-1949. *Jurnal Lembaran Sejarah*, Vol. 18 (1), hal. 43-55.
- Alfian, Ibrahim dkk. (1982). *Revolusi Kemerrdekaan di Aceh (1945-1949)*. Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Aman. (2015). *Sejarah Indoensia Masa Merdeka: 1945-1998*. Yogyakarta: Ombak.

- Ardianti, Rehardini Dwi. (2022). Perananan Mayor Jendral TNI (Purn) Raden Mohammad Mangoendiprojo dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia di Surabaya Tahun 1945-1949. *Jurnal Danadyaksa Historica*, Vol. 1 (1), hlm. 80-96.
- Arvianita, I., & Basuki, Y. E. (2022) Pertunjukan Amal: Dana Awal Perjuangan Rakyat di Yogyakarta 1945-1947. *Lembaran Sejarah*, 18(1), 25-42.
- Atno dan Nanda Julian Pratama. (2018). Dari Rakyat Untuk Rakyat: Benih, Cikal-Bakal, dan Kelahiran Tentara Indonesia 1945-1947. *Journal of Indonesian History*, vol. 7 (1), hal. 12-18.
- Cahyaningsih, Ratna. (2018). Perkembangan Jawatan Regie Tjandu dan Garam Hingga Perusahaan Garam dan Soda (PGSN) di Madura (1945-1957). *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah*, Vol. 3 (3), hlm. 317-330.
- Fitria, Devi Nur dan Djumarwan. Peran Gerakan Wanita Pada Masa Perang Kemerdekaan I Tahun 1945-1947 di Yogyakarta. http://library.fis.uny.ac.id/elibfis/index.php?p=show_detail&id=1770 (Diakses pada 29 Maret 2023, pukul 08.21 WIB).
- Hidayat, Rizal dan Siswanta. (2022). Peran Dapur Umum dalam Mendukung Perjuangan Masyarakat Dusun Kemusuk pada Ageresi Militer Belanda II 1949. *Jurnal Karmawibangga*, vol. 4 (1), hlm. 30-40.
- Ibrahim, Julianto. (2016). Candu dan Militer Keterlibatan Badan-Badan Perjuangan dalam Perdagangan Candu di Jawa Pada Masa Revolusi. *Jurnal Kawistara*, Vol. 6 (1), hal. 76-92.
- Kuntowijoyo. (2018). Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Maeswara, Garda. (2010). Sejarah Revolusi Indonesia 1945-1949: Perjuangan Bersenjata dan Diplomasi untuk Mempertahanka Kemerdekaan. Yogyakarta: Narasi.
- Nur L, Putri Indah dan Djumarwan. (2019). Peran Polisi dalam Pertahanan Kemerdekaan II Tahun 1945-1949 di Surakarta. *Jurnal Sindang*, Vol 1 (1), hlm. 58-69.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. (2010). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ricklefs. (2008). *Sejarah Indoensia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta
- Sapto, A. (2018). Keterlibatan Bandit, Pelacur, dan Seniman dalam Perjuangan Kemerdekaan di Jawa Timur (1945-1949). *Jurnal Sejarah dan Budaya*, Vol. 12 (2), hal. 128-145.
- Tim DHC BPP. (2003). *Banyumas Membawa Era Tahun 1945-1950*. Gombong: Grafika Group.
- Winarni, dkk. (2013). *Dapur Umum Masa Perang Kemerdekaan II di Yogyakarta*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.